

ADAPTASI SUMBER DAYA MANUSIA SATPOL PP TERHADAP DINAMIKA LINGKUNGAN PERKOTAAN DALAM Mendukung JAKARTA SEBAGAI KOTA GLOBAL

Ujang Januar

Program Magister Terapan Administrasi Publik, Politeknik STIA LAN Jakarta, Indonesia.

Email: Januar.bimmers@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini menganalisis adaptasi sumber daya manusia (SDM) Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) terhadap dinamika lingkungan perkotaan Jakarta dalam proses transformasinya menuju kota global. Dengan pendekatan kualitatif deskriptif-analitis, penelitian ini menggali bagaimana petugas memaknai kepemimpinan operasional, melaksanakan patroli dan penegakan, serta merespons tuntutan teknologi dan sosial dalam tata kelola kota. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan analisis dokumen terhadap 15 informan yang dipilih secara purposive, terdiri dari pejabat struktural, pengendali lapangan, anggota pelaksana, serta masyarakat. Temuan menunjukkan bahwa adaptasi SDM masih terbatas, terutama dalam literasi digital, kemampuan analitis, dan keterampilan komunikasi humanis. Pemanfaatan teknologi seperti CCTV cerdas, aplikasi pelaporan digital, dan sistem command center belum optimal. Implementasi program inovatif seperti Prabu Jakarta, Masyarakat Peduli Tramtibum (MPT), dan Sosbinluh masih inkonsisten akibat pemahaman internal yang tidak merata dan ketiadaan prosedur baku. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan SDM Satpol PP memerlukan pembangunan kapasitas yang terarah dan berkelanjutan dengan penekanan pada kompetensi teknis, manajerial, dan sosial. Peningkatan kemampuan teknologi, standar komunikasi, serta koordinasi lintas sektor menjadi kunci dalam mewujudkan tata kelola ketertiban umum yang sesuai dengan standar kota global.

Kata kunci: ketertiban umum, kapasitas SDM, Satpol PP, tata kelola perkotaan, kota global

Abstract

This study analyzes the adaptation of human resources (HR) within the Civil Service Police Unit (Satpol PP) to the dynamics of Jakarta's rapidly evolving urban environment in its transition toward becoming a global city. Using a descriptive-analytical qualitative approach, the research explores how officers interpret operational leadership, perform patrol and enforcement duties, and respond to technological and social demands in urban governance. Data were collected through in-depth interviews, field observations, and document analysis involving 15 informants selected purposively, consisting of structural officials, operational supervisors, field personnel, and community members. The findings reveal that HR adaptation remains limited, particularly in digital literacy, analytical capacity, and humanistic communication skills. Technological tools such as smart CCTV, digital reporting applications, and command center systems are not yet utilized optimally. The implementation of innovative programs including Prabu Jakarta, Community-Based Public Order Initiatives (MPT), and Sosbinluh shows inconsistencies due to uneven internal understanding and the absence of standardized procedures. The study concludes that strengthening Satpol PP's HR requires integrated and continuous capacity building that aligns technical, managerial, and social competencies. Enhancing technological proficiency, communication standards, and cross-sectoral coordination is essential for ensuring effective public order governance consistent with global city standards..

Keywords: *public order, human resource capacity, Satpol PP, urban governance, global city*

PENDAHULUAN

Transformasi Jakarta menuju kota global menempatkan kualitas tata kelola pemerintahan sebagai elemen kunci keberhasilan pembangunan. Standar kota global tidak hanya dipenuhi melalui kemajuan infrastruktur dan teknologi, tetapi juga melalui kemampuan pemerintah menghadirkan keamanan, ketertiban umum, dan ruang publik yang tertata dengan baik (Bayquni, 2020). Aparatur penegak peraturan daerah, khususnya Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), menjadi komponen penting dalam menjaga keteraturan kota. Efektivitas kinerja Satpol PP sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia (SDM) yang menjalankan fungsi operasional di lapangan (Sulistiani, 2021).

Perubahan status Jakarta menjadi daerah khusus dengan orientasi sebagai kota global menciptakan tuntutan baru terhadap kapasitas SDM Satpol PP. Standar keamanan kota global mensyaratkan aparat yang profesional, terampil menggunakan teknologi, responsif terhadap dinamika sosial, serta mampu menghadirkan layanan publik yang humanis. Kualitas SDM menjadi faktor penentu apakah Satpol PP mampu memenuhi ekspektasi tersebut (Thaha, 2016). Literatur administrasi publik memandang SDM sebagai aset inti organisasi yang memengaruhi pencapaian tujuan dan keberhasilan implementasi kebijakan.

Kondisi SDM Satpol PP Jakarta menunjukkan adanya tantangan serius dalam pemenuhan kompetensi yang dibutuhkan. Komposisi pendidikan personel masih didominasi lulusan SMA/ sederajat yang memiliki keterbatasan dalam literasi digital, penguasaan teknologi pengawasan, serta kemampuan analitis (Alam, 2024). Penggunaan sistem digital seperti CCTV cerdas, command center, dan aplikasi pelaporan belum dilakukan secara optimal karena rendahnya kapasitas teknis personel (Manik et al., 2025). Kesenjangan ini menimbulkan hambatan dalam menjalankan pengawasan ruang publik yang berbasis teknologi, padahal teknologi menjadi fondasi keamanan kota global.

Pelaksanaan program-program inovatif Satpol PP juga belum memberikan hasil yang maksimal. Program seperti Prabu Jakarta, Masyarakat Peduli Tramtibum (MPT), dan kegiatan Sosialisasi, Pembinaan, dan Penyuluhan (Sosbinluh) tidak berjalan efektif karena personel belum didukung oleh keterampilan komunikasi publik, materi pelatihan yang memadai, dan mekanisme implementasi yang terstandarisasi (Zakiyah & Sadad, 2023). Keterbatasan ini berdampak pada rendahnya efektivitas kegiatan pembinaan masyarakat, koordinasi dengan relawan, dan pencapaian tujuan peningkatan ketertiban umum (Suhendi, 2019).

Peran Satpol PP di lingkungan perkotaan modern membutuhkan SDM yang mampu menguasai keterampilan teknis, manajerial, dan sosial secara seimbang. Keterampilan teknis mencakup penguasaan teknologi, pemahaman regulasi, dan kemampuan patroli. Keterampilan manajerial mencakup kemampuan koordinasi, pemetaan wilayah, dan pengambilan Keputusan (Adela Dwi Mardini, 2025). Keterampilan sosial mencakup

komunikasi publik, pendekatan humanis, dan kemampuan menyelesaikan konflik. Ketidakseimbangan kompetensi ini menimbulkan kesulitan dalam menghadirkan pelayanan ketertiban umum yang sesuai standar kota global (Herawati, 2024).

Permasalahan SDM Satpol PP terlihat melalui kesenjangan antara tuntutan kinerja dan kemampuan implementatif personel. Kinerja administratif seperti penyelesaian tipiring memang meningkat, tetapi indikator outcome seperti penurunan pelanggaran, peningkatan keteraturan ruang publik, dan perubahan perilaku masyarakat belum menunjukkan perkembangan yang signifikan (Dewi & Abas, 2024). Ketidakefektifan ini mencerminkan perlunya penguatan kapasitas SDM secara sistematis dan terukur.

Urgensi penguatan SDM Satpol PP semakin jelas ketika mempertimbangkan posisi Jakarta sebagai kota dengan mobilitas tinggi, keberagaman sosial, dan dinamika perkotaan yang kompleks (Song et al., 2023). Aparatur yang bertugas menjaga ketertiban harus mampu menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan, memanfaatkan teknologi, dan menjalin kemitraan dengan masyarakat. Tanpa SDM yang kompeten, strategi penegakan perda dan pengawasan ruang publik tidak akan memberikan dampak nyata meskipun didukung regulasi dan inovasi kebijakan (Gunawan, 2012).

Analisis mendalam mengenai kapasitas SDM Satpol PP menjadi penting untuk memahami akar permasalahan dan merumuskan arah penguatan yang diperlukan. Artikel ini bertujuan untuk menguraikan kebutuhan kompetensi SDM Satpol PP dalam konteks kota global, memetakan tantangan yang dihadapi, serta memberikan gambaran mengenai faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas peran Satpol PP di ruang publik perkotaan Jakarta. Pemahaman terhadap kondisi SDM diharapkan dapat menjadi dasar perumusan strategi penguatan SDM dalam mendukung terwujudnya kota yang aman, tertib, dan berdaya saing global.

METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif-analitis untuk memahami adaptasi sumber daya manusia (SDM) Satpol PP terhadap dinamika lingkungan perkotaan dalam mendukung Jakarta sebagai kota global. Pendekatan kualitatif dipilih karena fokus penelitian adalah pada makna, proses, dan praktik aktor lapangan termasuk kepemimpinan operasional, pola kerja, dan kesiapan kompetensi yang tidak sepenuhnya tertangkap melalui pengukuran kuantitatif saja (Creswell, 2014).

Lokasi dan partisipan.

Penelitian dilaksanakan pada unit pelaksana Satpol PP di wilayah administratif DKI Jakarta. Informan dipilih secara purposive untuk memperoleh perspektif strategis dan operasional. Kelompok informan meliputi: Wakil Kepala Satpol PP Provinsi DKI Jakarta; Sekretaris Dinas Satpol PP Provinsi; Kepala Satpol PP Kota Administrasi Jakarta Utara; tiga Kepala Satpol PP Kecamatan; tiga pengendali Satpol PP kecamatan; anggota/pegawai lapangan; serta lima

warga masyarakat setempat. Total informan = 15 orang, jumlah yang konsisten dengan pedoman kejenuhan data pada studi kualitatif (Guest, Bunce, & Johnson, 2006).

Teknik pengumpulan data.

Data dikumpulkan melalui kombinasi tiga teknik:

1. Observasi partisipatif dan non-partisipatif di lapangan. Observasi difokuskan pada kegiatan patroli, penertiban PKL, penggunaan teknologi (CCTV, aplikasi pengawasan), mekanisme koordinasi antar-instansi, dan interaksi Satpol PP-masyarakat. Observasi mengikuti pedoman etnografis untuk menangkap tindakan sosial dalam konteks alamiah (Spradley, 2006).
2. Dokumentasi. Dokumen pendukung yang dikaji meliputi SOP ketertiban, laporan pelanggaran tahunan, laporan operasi, data ketenagakerjaan, peraturan daerah dan peraturan gubernur terkait, RPJPD, serta laporan dan bahan program inovasi Satpol PP.
3. Studi Literatur: Studi literatur yang digunakan mengacu pada beberapa jurnal, laporan dan buku yang bersangkutan dengan penelitian yang diambil.

Analisis data.

Proses analisis mengikuti siklus Miles & Huberman (2014): (1) reduksi data (coding dan pengelompokan tema), (2) penyajian data (narasi tematik, matriks, dan tabel), dan (3) penarikan kesimpulan/Verifikasi. Hasil tematik selanjutnya diinterpretasikan melalui matriks SWOT untuk merumuskan rekomendasi strategi penguatan SDM, kepemimpinan, dan kinerja operasional Satpol PP.

Keabsahan dan reliabilitas.

Keabsahan data diperkuat melalui beberapa teknik: triangulasi sumber (membandingkan pandangan antar level informan), triangulasi metode (wawancara, observasi, dokumentasi), member checking (konfirmasi ringkasan temuan kepada informan kunci), dan peer debriefing dengan akademisi/praktisi terkait. Pendekatan ini sejalan dengan kriteria kredibilitas, transferabilitas, dependabilitas, dan konfirmabilitas dalam penelitian kualitatif (Lincoln & Guba, 1985; Creswell, 2014).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa adaptasi sumber daya manusia Satpol PP terhadap dinamika lingkungan perkotaan Jakarta berada pada level yang belum sepenuhnya memenuhi tuntutan kota global. Perubahan karakteristik kota yang semakin padat, dinamis, dan berbasis teknologi menuntut kompetensi aparatur yang lebih modern, namun kenyataan di lapangan menunjukkan adanya kesenjangan antara tuntutan tersebut dan kapasitas aktual petugas. Temuan wawancara dan observasi menggambarkan adanya perbedaan signifikan dalam kualitas kinerja antaranggota, terutama terkait penguasaan teknologi dan kemampuan pelayanan publik.

Kapasitas literasi digital menjadi kelemahan utama yang paling menonjol. Sebagian besar anggota Satpol PP, khususnya pada level pelaksana, belum mampu memanfaatkan perangkat digital secara optimal dalam kegiatan pengawasan. Penggunaan CCTV cerdas, aplikasi pelaporan, dan sistem komunikasi digital masih terbatas pada petugas tertentu,

sementara mayoritas masih menggunakan pola pengawasan manual. Kondisi ini menyebabkan lambatnya respons terhadap gangguan ketertiban serta kurangnya dokumentasi berbasis data yang dapat dijadikan dasar analisis situasi.

Temuan lain menunjukkan bahwa kompetensi sosial dan komunikasi humanis para petugas masih bervariasi. Masyarakat yang diwawancarai menyampaikan bahwa sebagian petugas bersikap persuasif dan ramah, namun sebagian lainnya masih menggunakan pendekatan komando yang cenderung menimbulkan resistensi masyarakat. Ketidakkonsistenan ini terjadi karena tidak adanya standar pelatihan komunikasi publik yang diterapkan secara merata. Dalam konteks transformasi Jakarta sebagai kota global, kemampuan komunikasi interpersonal menjadi bagian penting untuk memastikan penegakan ketertiban dilakukan secara profesional. Program inovatif seperti Prabu Jakarta, Masyarakat Peduli Tramtibum (MPT), dan kegiatan Sosbinluh belum menunjukkan efektivitas secara optimal. Wawancara dengan pengendali lapangan mengungkapkan bahwa banyak petugas belum memahami prosedur kerja dan tujuan strategis dari program-program tersebut. Kurangnya sosialisasi internal membuat implementasi inovasi berjalan tidak seragam antarwilayah. Ketidakteraturan ini berdampak pada rendahnya capaian pembinaan masyarakat serta lemahnya koordinasi antara petugas, relawan, dan perangkat daerah lainnya.

Hasil observasi memperlihatkan bahwa pola kerja Satpol PP masih sangat bergantung pada pengalaman lapangan dan bukan pada pemetaan wilayah yang berbasis data. Kemampuan analitis personel seperti mengidentifikasi pola pelanggaran, menentukan prioritas lokasi patroli, atau mengevaluasi tren ketertiban—belum berkembang secara optimal. Kurangnya pelatihan berbasis data membuat pengambilan keputusan operasional tidak sepenuhnya mempertimbangkan dinamika aktual ruang publik. Keterbatasan kompetensi manajerial juga terlihat pada koordinasi antar-instansi. Informan dari kalangan pejabat struktural menyatakan bahwa koordinasi Satpol PP dengan Dishub, kelurahan, DLH, dan kepolisian masih bersifat situasional dan belum memiliki mekanisme terpadu. Akibatnya, penanganan pelanggaran di lapangan sering tertunda karena membutuhkan konfirmasi lintas sektor. Dalam konteks kota global, koordinasi antar lembaga merupakan syarat mendasar untuk menciptakan respons yang cepat, efisien, dan terukur.

Struktur kompetensi internal Satpol PP masih didominasi oleh kemampuan fisik dan pengalaman lapangan, sementara kemampuan teknis modern seperti literasi digital, pemanfaatan perangkat komunikasi cerdas, dan manajemen informasi belum dimiliki sebagian besar anggota. Dominasi lulusan SMA pada komposisi personel menjadi faktor yang berpengaruh terhadap lambatnya proses adaptasi teknologi. Hal ini menyebabkan pemerataan kompetensi tidak tercapai dan menghasilkan ketidakseimbangan antara tuntutan teknologi dan kemampuan implementasi anggota.

Dari perspektif masyarakat, Satpol PP dianggap memiliki disiplin kerja yang baik namun belum sepenuhnya memberikan pelayanan publik yang humanis. Beberapa warga mengapresiasi kehadiran Satpol PP dalam mengendalikan pelanggaran ruang publik, sementara sebagian lainnya menilai bahwa pendekatan penegakan masih bersifat kaku. Variasi persepsi ini menguatkan dugaan bahwa kualitas interaksi petugas dengan masyarakat sangat dipengaruhi oleh kompetensi individual dan bukan oleh standar organisasi yang baku. Analisis dokumen menunjukkan bahwa berbagai inovasi dan kebijakan daerah sebenarnya telah memberikan kerangka kerja modern bagi Satpol PP, tetapi kapasitas SDM belum siap mengimbangi arah kebijakan tersebut. Misalnya, Pergub terkait pengawasan digital dan pemanfaatan command center belum diterapkan secara

merata karena keterbatasan pelatihan teknis. Kondisi ini menandakan adanya kesenjangan antara kebijakan tingkat makro dan kemampuan pelaksana di tingkat mikro.

Hasil analisis SWOT memperlihatkan bahwa kelemahan internal Satpol PP lebih dominan dibandingkan kekuatan yang dimiliki organisasi. Kelemahan tersebut meliputi keterbatasan literasi digital, kurangnya pelatihan tematik, ketidakseragaman dalam implementasi inovasi, dan lemahnya koordinasi lintas sektor. Sementara itu, peluang eksternal seperti perkembangan teknologi kota cerdas dan meningkatnya partisipasi masyarakat belum dimanfaatkan secara optimal karena ketidaksiapan kompetensi internal. Dinamika lingkungan perkotaan Jakarta yang penuh kompleksitas—mulai dari kepadatan penduduk hingga tingginya aktivitas ekonomi informal—menuntut adaptasi SDM yang lebih responsif. Namun temuan penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar anggota masih bekerja berdasarkan pola lama yang tidak kompatibel dengan standar kota global. Tantangan eksternal yang dihadapi petugas seringkali tidak sejalan dengan kapasitas internal yang tersedia, sehingga efektivitas pengawasan ruang publik belum mencapai tingkat yang diharapkan.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menegaskan bahwa adaptasi SDM Satpol PP masih berada pada fase transisi. Pemahaman mengenai tuntutan kota global sudah mulai terbangun, tetapi belum diikuti oleh implementasi yang kuat di lapangan. Keberhasilan Jakarta dalam mewujudkan ketertiban umum berstandar global sangat bergantung pada peningkatan kompetensi SDM secara holistik, yang mencakup penguasaan teknologi, kemampuan komunikasi publik, dan penguatan manajerial agar Satpol PP dapat berperan sebagai aktor strategis dalam tata kelola kota global.

KESIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa adaptasi sumber daya manusia Satpol PP terhadap dinamika lingkungan perkotaan Jakarta masih berada pada tahap yang belum sepenuhnya mampu menjawab tuntutan transformasi menuju kota global. Kualitas tata kelola ketertiban umum kini sangat bergantung pada kemampuan aparaturnya menguasai teknologi, berkomunikasi secara humanis, serta memahami kompleksitas sosial masyarakat perkotaan. Namun temuan penelitian menunjukkan bahwa kapasitas SDM Satpol PP masih terhambat oleh rendahnya literasi digital, ketidakmerataan kompetensi teknis, serta belum terstandarnya kemampuan komunikasi interpersonal di lapangan. Implementasi program inovasi seperti Prabu Jakarta, Masyarakat Peduli Tramtibum (MPT), dan Sosbinluh belum berjalan optimal akibat minimnya pemahaman petugas dan ketidakteraturan pelaksanaan di lapangan. Selain itu, pola kerja masih bergantung pada pengalaman individual, bukan pada pemetaan berbasis data yang menjadi ciri pengelolaan kota modern. Ketidakseimbangan kompetensi teknis, manajerial, dan sosial membuat proses pengawasan ruang publik belum mencapai efektivitas yang sejalan dengan standar kota global. Secara keseluruhan, menegaskan bahwa adaptasi SDM Satpol PP membutuhkan penguatan yang lebih terarah, sistematis, dan berkelanjutan. Transformasi Jakarta menuju kota global hanya dapat tercapai apabila kapasitas aparaturnya ditingkatkan melalui pelatihan teknologi, pembakuan komunikasi humanis, pengembangan analisis data, serta penguatan koordinasi lintas sektor. Dengan memperbaiki kualitas SDM secara holistik, Satpol PP dapat berperan lebih strategis dalam menjaga ketertiban, meningkatkan pelayanan publik, dan mendukung terwujudnya kota Jakarta yang aman, tertib, dan berdaya saing global.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami ucapkan terima kasih atas semua pihak yang terkait sehingga lancar dan sukses.

REFERENSI

- Adela Dwi Mardini, Saut Gracer Sijabat. (2025). Analisis Beban Kerja Satpol PP Kelurahan Bidara Cina Kota Jakarta Timur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta saat ini menjadi tolak ukur bagi Provinsi dan pengaduan masyarakat dapat menjadi bagian dari transformasi digital yang. 25(1), 81–89.
- Alam, Muhammad Dharma. (2024). ENFORCEMENT OF REGIONAL REGULATION NO. 2 OF 2018 ON PUBLIC ORDER AND COMMUNITY TRANQUILITY BY SATPOL PP IN TULANG BAWANG REGENCY, LAMPUNG PROVINCE. *Jurnal Tatapamong*, 6(1), 49–64.
- Bayquni. (2020). THE EFFECTIVENESS OF REGIONAL REGULATION COVID-19 IN STREET SELLERS IN JAKARTA BARAT. *Moestopo International Review on Societies, Humanities, and Sciences (MIRSHuS)*, 14(2), 25–35.
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Dewi, Sartika, & Abas, Muhamad. (2024). THE ROLE OF THE PAMONG PRAJA POLICE UNIT IN IMPLEMENTING ORDER. *Jurnal Dusturiyah*, 14(2), 853–861.
- Guest, G., Bunce, A., & Johnson, L. (2006). How many interviews are enough? *Field Methods*, 18(1), 59–82.
- Gunawan. (2012). KONTRIBUSI KESATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT DALAM MEMBERIKAN RASA KEAMANAN, KETERTIBAN, DAN KETENTRAMAN LINGKUNGAN: Studi Identifikasi Profil Satuan Polisi Pamong Praja. *Jurnal Bina Praja*, 4(1), 35–44.
- Herawati, Widy Aulia Minarwanti; Ratna. (2024). Implementation of Business and Environmental Order by the Municipal Police Unit Based on Grobogan Regency Regional Regulation No. 15 of 2014 on Public Order in Grobogan Regency. *International Journal of Social Science Research and Review*, 7(10), 114–125.
- Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). *Naturalistic inquiry*. SAGE Publications.
- Manik, Martua, Hutaaruk, Appe, Sihotang, Muhenri, & Manik, Martua. (2025). Enforcement of Business Order by the Municipal Police in Pulogadung District under Jakarta Regional Regulation No. 8 of 2007 on Public Order. *Equality : Journal of Law and Justice*, 2(2), 272–289.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Rangkuti, F. (2015). *Analisis SWOT: Teknik membedah kasus bisnis*. Gramedia Pustaka Utama.
- Song, Kai, Chen, Yue, Duan, Yongbiao, & Zheng, Ye. (2023). Urban Governance Urban governance: A review of intellectual structure and topic evolution. *Urban Governance*, 3(3), 169–185. <https://doi.org/10.1016/j.ugj.2023.06.001>
- Spradley, J. P. (2006). *The ethnographic interview*. Waveland Press.
- Suhendi, Dedy. (2019). PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM (Studi terhadap Penerapan Standar Operasional Prosedur Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat). *Jurnal Tatapamong*, 35–47.
- Sulistiani, Tri Suhartanto; Dr. Indr. Perwirab; Dr. Eli. Rusmiatic; Dr. Lie. (2021). Differences in Authority Between Satpol PP and Polri in Creating General Order. *International Journal of Innovation, Creativity and Change*, 15(4), 1098–1114.

- Thaha, Rasyid. (2016). Public Ethics in Civil Service Police Unit (Satpol PP) of Makassar. *International Journal of Administrative Science & Organization*, 23(1), 36–44.
- Zakiah, Ainun, & Sadad, Abdul. (2023). KINERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM MENERTIBKAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTA PEKANBARU. 6(1), 195–206.